

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abraham Amos H.F., *Legal Opinion Teorities & Empirisme*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke-5, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Triweka Rinanti, *Dilema Kreditor Separatis di Pengadilan Niaga (Cetakan Kedua)*, Jakarta, 2006

### Literatur Hukum

- Anita Suryani Lumbantobing, *Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Harta Pailit Ketika Debitur Mengalihkan Asetnya Pada Pihak Lain (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Medan No. Reg : 07/Pdt. Sus-Actio*

*Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn*), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017

Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017

### **Peraturan Perundangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang nomor 50 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas